

ANALISIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Rheinhard Calvin Maniagasi¹, Elsyhan R. Marlissa², Maylen K. P. Kambuaya³,
Agustinus Salle⁴, Paulus K. Allo Layuk⁵, Quincy Kambuaya⁶
Universitas Cenderawasih, Indonesia
Email: rheinhard104@gmail.com

Article History

Received: 30-10-2025
Revision: 13-11-2025
Accepted: 15-11-2025
Published: 15-11-2025

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness and efficiency of the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in efforts to improve the quality of public services at the Teluk Bintuni Regency Education, Culture, Youth and Sports Office. This study uses a qualitative descriptive approach involving four key informants, namely the Head of the Education Office, the Acting Head of Basic Education, the Head of Planning, and the Head of Control and Reporting of Bappelitbangda. Primary data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, while secondary data was obtained from reports, archives, and official regulations from 2021–2022. The results of the study show that the implementation of SPM has had a positive impact on improving the quality of compliance and community access to education services, although the level of indicator fulfilment still varies between regions. The SPM implementation process was carried out in a structured manner through the stages of socialisation, data collection, gap analysis, action plan preparation, programme implementation, and monitoring and evaluation. The effectiveness of SPM implementation is evident in the improvement of teacher qualifications, infrastructure, and expanded access to education, while efficiency is still constrained by geographical factors, budget limitations, and human resource distribution. Local government efforts through the ‘Smart Village’ programme with the ‘Menyala Internetku’ initiative also support the strengthening of data-based reporting and educational connectivity in remote areas. Overall, the research results reflect the Teluk Bintuni Regency Government's ongoing commitment to realising equitable, accountable, and adaptive education services in the face of regional challenges.*

Keywords: *Minimum Service Standards, Effectiveness, Efficiency, Public Accountability, Education.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan empat informan kunci, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kasubag Perencanaan, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappelitbangda. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan, arsip, dan regulasi resmi tahun 2021–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPM telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kepatuhan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, meskipun tingkat pemenuhan indikator masih bervariasi antarwilayah. Proses implementasi SPM dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan sosialisasi, pengumpulan data, analisis kesenjangan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Efektivitas penerapan SPM terlihat pada peningkatan kualifikasi guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan, sedangkan efisiensi masih terkendala oleh faktor geografis, keterbatasan anggaran, dan distribusi sumber daya manusia. Upaya pemerintah daerah melalui program “Smart Village” dengan inisiatif “Menyala Internetku” turut mendukung penguatan pelaporan berbasis data dan konektivitas pendidikan di wilayah terpencil. Secara keseluruhan, hasil penelitian mencerminkan komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan wilayah.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal, Efektivitas, Efisiensi, Akuntabilitas Publik, Pendidikan.

How to Cite: Maniagasi, R.C. (2025). Analisis Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga di Kabupaten Teluk Bintuni. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 7224-7238. [10.54373/ifijeb.v5i4.4477](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i4.4477)

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen strategis dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang setara dan terukur bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pendidikan, SPM menegaskan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran agar layanan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (Permendagri No. 59 Tahun 2021; PP No. 2 Tahun 2018). Seiring dengan perkembangan zaman, transformasi digital, serta meningkatnya kebutuhan kompetensi sumber daya manusia, urgensi penerapan SPM menjadi semakin penting. Modernisasi dan perubahan sosial telah menuntut peningkatan mutu pembelajaran serta pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Ali, 2012). Oleh sebab itu, analisis terhadap implementasi SPM dalam sektor pendidikan menjadi mendesak untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, selaras dengan amanat konstitusi desentralisasi (UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014).

Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik geografis yang kompleks—meliputi wilayah pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan—dengan sebaran penduduk yang tidak merata serta keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini menyebabkan pemerataan layanan pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Faktor geografis dan sosial tersebut membedakan Teluk Bintuni dari kabupaten lain yang memiliki akses transportasi dan fasilitas publik lebih memadai. Terbitnya Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta pembentukan tim pelaksana menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas penerapan kebijakan SPM di daerah kepulauan-pedalaman. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) berperan sebagai institusi utama dalam memastikan kebijakan ini terlaksana secara kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Teluk Bintuni.

Penelitian ini berfokus pada tiga komponen utama, yaitu (1) implementasi SPM pendidikan yang meliputi proses sosialisasi, pemetaan, analisis kesenjangan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi; (2) faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi seperti sumber daya, komitmen manajemen, pelatihan, tata kelola, dan infrastruktur; serta (3) kualitas layanan publik pendidikan yang diukur melalui

efektivitas, efisiensi, akses, kepatuhan, dan mutu pembelajaran. Secara teoritis, ketersediaan sumber daya yang memadai dan komitmen manajerial yang kuat terbukti memperkuat implementasi SPM, sementara pelaksanaan yang optimal berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan (Fadlika, 2024; Wijayanti & Kurniawan, 2021). Sebaliknya, keterbatasan fasilitas, distribusi guru yang tidak merata, serta lemahnya tata kelola berpotensi menurunkan kualitas layanan (Susanti & Wahyudi, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti keberhasilan dan tantangan implementasi SPM di berbagai sektor. Fadlika (2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan komitmen manajemen, sedangkan Marta (2024) menemukan kendala implementasi SPM bayi baru lahir akibat kurangnya SDM dan fasilitas. Risdiyanti (2024a, 2024b) mengungkap adanya ketimpangan alokasi pembiayaan kesehatan, sementara Sulistyorini (2024) dan Alam (2023) menekankan perlunya peningkatan aspek keselamatan dan kenyamanan pada sektor transportasi. Dalam bidang pendidikan, Wijayanti dan Kurniawan (2021) menemukan bahwa implementasi SPM berdampak positif terhadap mutu pembelajaran, namun penelitian Susanti dan Wahyudi (2020) menunjukkan masih terdapat kendala akses dan rendahnya kualitas guru di daerah tertinggal. Kesenjangan penelitian muncul karena sangat terbatas studi yang secara spesifik menganalisis penerapan SPM pendidikan pada tingkat dinas di kawasan timur Indonesia, khususnya di Teluk Bintuni dengan konteks regulasi lokal dan karakter geografis yang kompleks. Penelitian Pratama dan Rahmawati (2022) memang menyoroti perbedaan capaian SPM antara sekolah negeri dan swasta, namun belum mengaitkannya dengan dinamika kelembagaan pemerintah daerah seperti Disdikbudpora di kawasan kepulauan-pedalaman.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis kelembagaan implementasi SPM pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian ini memadukan perspektif proses implementasi secara menyeluruh, faktor-faktor penentu, serta luaran terhadap kualitas layanan publik pendidikan dengan mengaitkan kerangka nasional (PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021) dan kerangka lokal (Perbup No. 3 Tahun 2023) dalam konteks geografis yang menantang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan peta kesenjangan (*gap analysis*) serta rekomendasi operasional untuk memperkuat sumber daya manusia, sistem tata kelola, pembiayaan, dan infrastruktur pendidikan. Sementara itu, secara akademik, penelitian ini diharapkan

memperluas bukti empiris mengenai implementasi SPM pendidikan di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPM pendidikan di Disdikbudpora Kabupaten Teluk Bintuni, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menilai efektivitas dan efisiensi implementasinya terhadap peningkatan kualitas layanan publik pendidikan (Fadlika, 2024; Marta, 2024; Risdiyanti, 2024a, 2024b; Susanti & Wahyudi, 2020; Wijayanti & Kurniawan, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni? Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses penerapan SPM pada dinas tersebut? Ketiga, sejauh mana efektivitas dan efisiensi penerapan SPM berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi proses penerapannya, serta menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penerapan tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja karena dinas tersebut memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang kompleks, meliputi kawasan pesisir, pedalaman, serta perbukitan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni relevan untuk dikaji secara mendalam guna memahami praktik implementasi SPM pada konteks pemerintahan daerah kepulauan–pedalaman yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan mendalam mengenai proses, aktor, dan dinamika implementasi kebijakan SPM di tingkat daerah. Pendekatan ini dipilih karena menekankan makna, proses, serta perspektif para partisipan dalam situasi sosial yang

alami (Creswell & Poth, 2018). Data yang digunakan bersifat kualitatif berupa narasi, pengalaman, dan pandangan informan, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi lapangan, dan penelusuran dokumen resmi.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan SPM, baik dari sisi penyelenggara maupun penerima layanan pendidikan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive–maximum variation sampling* dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan keragaman pengalaman (Patton, 2015; Palinkas, 2024). Informan kunci dari pihak penyelenggara meliputi empat pejabat utama, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Subbagian Perencanaan, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk mewakili penerima layanan, penelitian ini juga melibatkan guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua siswa dari berbagai satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Pemilihan informan penerima layanan dilakukan untuk memperoleh variasi konteks berdasarkan lokasi (pesisir, pedalaman, dan perbukitan), jenjang pendidikan, serta tipe satuan (negeri dan swasta). Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi hingga mencapai saturasi data, yakni ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema baru (Guest et al., 2021; Hennink & Kaiser, 2022).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan panduan terbuka agar peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, dan kendala dari berbagai pihak secara mendalam. Wawancara terhadap pejabat dinas berfokus pada kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi SPM, sedangkan wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa diarahkan untuk memahami persepsi penerima manfaat terhadap kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dan non-partisipatif terhadap aktivitas pelayanan dan koordinasi antarunit pelaksana SPM. Untuk memperkuat bukti empiris, dilakukan pula diskusi kelompok terarah (FGD) dengan perwakilan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk menangkap dinamika persepsi serta kesepahaman antar pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), laporan capaian SPM, notulen rapat koordinasi, berita acara kegiatan, arsip foto, dan regulasi pemerintah daerah tahun 2021–2022. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendukung proses

triangulasi sumber dan menegakkan audit trail dalam pembuktian data (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahap utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan melalui proses seleksi, kategorisasi, dan pengabstrakan informasi yang relevan; penyajian data disusun dalam bentuk naratif, tabel ringkas, dan matriks tematik agar memudahkan pembacaan pola; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil temuan antar sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas interpretasi. Analisis juga dilakukan lintas kelompok antara pemberi dan penerima layanan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta titik temu persepsi terkait efektivitas dan efisiensi penerapan SPM.

Untuk memperkaya deskripsi kualitatif, dilakukan pula kuantifikasi sederhana melalui perhitungan rasio kepatuhan, yakni perbandingan antara jumlah indikator SPM yang telah terpenuhi dengan total indikator yang ditetapkan, serta rasio produktivitas, yaitu perbandingan antara output layanan pendidikan dengan sumber daya dan waktu yang digunakan. Perhitungan ini bersifat pelengkap dan tidak dimaksudkan sebagai uji statistik inferensial, melainkan untuk memperjelas proporsi capaian kebijakan di lapangan.

Keabsahan data dijaga dengan menerapkan prinsip trustworthiness (Lincoln & Guba, 1985), yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Upaya peningkatan kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber (pejabat pemerintah, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa), triangulasi teknik (wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu dengan pengecekan ulang hasil wawancara pada waktu yang berbeda. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi ringkasan hasil temuan kepada informan kunci, sementara audit trail disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses analisis dan keputusan penelitian. Peneliti juga menerapkan reflektivitas untuk meminimalkan bias interpretatif yang mungkin muncul selama proses pengumpulan dan analisis data.

Penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian sosial dengan memperoleh persetujuan (informed consent) dari seluruh partisipan secara sukarela setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan seluruh data disimpan secara aman. Penelitian ini juga telah mendapatkan izin penelitian dari pemerintah daerah setempat. Dengan rancangan

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni dari perspektif penyelenggara maupun penerima layanan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi empiris dan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan. Informan penelitian terdiri dari empat pejabat kunci, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kasubag Perencanaan, serta Kepala Bappelitbangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan SPM dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi sosialisasi, pengumpulan data, analisis kesenjangan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa penerapan SPM telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, kepatuhan terhadap standar, dan akses masyarakat terhadap pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta ketimpangan distribusi dan kompetensi tenaga pendidik di wilayah terpencil.

Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan

Wawancara pada 8 Januari 2025 menunjukkan bahwa penerapan SPM dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan sosialisasi, pengumpulan data, analisis kesenjangan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Kepala Dinas menegaskan bahwa keberhasilan SPM dipengaruhi oleh kondisi geografis dan demografis yang menantang, keterbatasan anggaran, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Ia menyebut penerapan SPM telah meningkatkan kualitas layanan, tetapi efisiensi masih terkendala oleh minimnya sumber daya dan akses wilayah.

Hasil Wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Plt. Kabid menguraikan bahwa implementasi SPM dimulai dengan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas, dilanjutkan pengumpulan data melalui Dapodik. Data digunakan untuk melihat kesenjangan layanan pendidikan. Tantangan utama berasal dari akses geografis, keterbatasan anggaran, dan ketimpangan distribusi guru. Ia menilai

SPM efektif sebagai kerangka peningkatan mutu, tetapi efisiensi terhambat oleh biaya operasional tinggi dan minimnya sarana pendukung. Upaya perbaikan dilakukan melalui perencanaan berbasis data dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring.

Hasil Wawancara dengan Kasubag Perencanaan

Kasubag menjelaskan bahwa penerapan SPM merupakan siklus yang terstruktur mulai dari pedoman pusat, pengumpulan data lapangan, analisis kesenjangan, hingga integrasi rencana aksi ke dalam penganggaran. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh stabilitas anggaran, kualitas data, kapasitas SDM, koordinasi antarbidang, kondisi geografis, serta regulasi pusat dan provinsi. Ia menilai efektivitas SPM tinggi sebagai acuan perencanaan, tetapi efisiensi masih terhambat biaya operasional dan keterbatasan anggaran. Evaluasi berkala dan pemanfaatan teknologi terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja.

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappelitbangda

Kepala Bidang menekankan bahwa SPM dijalankan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, analisis kesenjangan, dan penyusunan SPM Pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Bupati. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, keterbatasan anggaran, kesenjangan kualitas pendidik, dan koordinasi lintas sektor turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Ia melihat peningkatan partisipasi sekolah dan kualifikasi guru, tetapi efisiensi masih melemah akibat biaya distribusi dan rendahnya integrasi kerja antarunit. Perbaikan dilakukan melalui inovasi layanan, teknologi, dan evaluasi rutin.

Hasil Wawancara dengan Penerima Layanan (Guru, Kepala Sekolah, Komite, dan Orang Tua)

Guru menilai SPM meningkatkan ketertiban administrasi, kehadiran guru, dan kepastian layanan pendidikan, meskipun pelatihan dan akses transportasi masih terbatas. Kepala sekolah menyatakan bahwa SPM memperjelas arah perencanaan sekolah, tetapi keterbatasan sarpras seperti laboratorium dan sanitasi menghambat pemenuhan indikator, terutama di daerah pedalaman.

Komite sekolah melihat peningkatan transparansi melalui rapat berkala dan papan informasi capaian SPM, meski sosialisasi di daerah terpencil masih kurang. Orang tua menyampaikan bahwa kualitas layanan dan kehadiran guru mulai membaik, tetapi akses transportasi dan jarak sekolah masih menjadi tantangan utama, terutama bagi anak di wilayah sungai atau pegunungan.

Melalui FGD, para pemangku kepentingan menyimpulkan bahwa keberhasilan SPM sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah untuk sarpras, pemerataan guru, dan pendanaan yang lebih responsif, serta perlunya umpan balik yang lebih cepat antara sekolah dan dinas.

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan*, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan ketentuan tersebut melalui berbagai program dan kegiatan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar ini merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang diatur dalam satu tahun anggaran. Setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan indikator dan standar yang telah ditetapkan dalam *Standar Pelayanan Minimal (SPM)* untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara di bidang pendidikan.

Adapun program dan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelayanan kebutuhan dasar bagi warga negara berusia 5–6 tahun dilaksanakan melalui penyediaan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hingga tahun terakhir pengamatan, terdapat 81 satuan pendidikan PAUD yang tersebar di berbagai distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak usia dini memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sebagai fondasi awal perkembangan kognitif, sosial, dan emosional.

2. Pendidikan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar bagi warga negara berusia 7–15 tahun diwujudkan melalui penyediaan satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini, terdapat 86 satuan pendidikan SD dan 36 satuan pendidikan SMP yang aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Pelayanan ini diarahkan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah, termasuk di wilayah terpencil dan terluar.

3. Pendidikan Kesetaraan

Untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyediakan layanan Pendidikan Kesetaraan bagi warga negara berusia 7–18 tahun. Program ini bertujuan

memberikan kesempatan belajar yang setara melalui jalur non-formal. Saat ini, terdapat 3 satuan pendidikan kesetaraan yang beroperasi dan melayani peserta didik di berbagai wilayah kabupaten.

4. Target dan Indikator Penerima Layanan SPM

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan target pencapaian *Standar Pelayanan Minimal (SPM)* dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Setiap target pelaksanaan dan realisasi program didukung oleh sumber pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana sah lainnya. Penetapan indikator penerima layanan SPM mengacu pada prinsip pemerataan, keterjangkauan, dan peningkatan mutu layanan pendidikan, dengan fokus pada percepatan pemenuhan standar minimal di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni.

HASIL PENELITIAN

Analisis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan SPM di Kabupaten Teluk Bintuni telah mengikuti tahapan standar—sosialisasi, pendataan, analisis kesenjangan, rencana aksi, dan monitoring evaluasi. Namun pemenuhan indikator masih bervariasi antarwilayah akibat keterbatasan guru, kondisi geografis ekstrem, dan sarana prasarana yang belum merata. Temuan guru dan kepala sekolah memperlihatkan bahwa sekolah pedalaman menghadapi hambatan lebih berat dalam memenuhi standar ruang kelas, sanitasi, dan kompetensi guru dibanding wilayah perkotaan/pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPM berjalan positif, tetapi pemerataannya masih dipengaruhi faktor struktural di luar kendali dinas.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi SPM

Tiga faktor utama memengaruhi keberhasilan SPM, yaitu SDM, pendanaan, dan sarana prasarana. Kekurangan guru mata pelajaran, distribusi tidak merata, serta kapasitas aparatur yang belum optimal menjadi kendala utama. Pendanaan terbatas, biaya logistik tinggi, serta aturan anggaran yang kaku menghambat respons cepat sekolah terhadap kebutuhan lapangan. Infrastruktur dasar seperti ruang kelas, air bersih, listrik, dan internet belum merata di wilayah terpencil.

Selain faktor internal, implementasi SPM sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah pusat dan provinsi, terutama terkait alokasi DAK, BOS, kebijakan rekrutmen PPPK, serta pendampingan teknis. Daerah 3T seperti Teluk Bintuni sangat bergantung

pada pembiayaan pusat; karena itu ketidaktepatan waktu penyaluran BOS/DAK atau formasi guru yang tidak sesuai kebutuhan menghambat pencapaian indikator.

Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan SPM

Secara efektivitas, SPM mulai memberikan arah yang jelas bagi peningkatan layanan pendidikan seperti meningkatnya kehadiran guru, partisipasi siswa, dan perbaikan sarpras di beberapa wilayah. Namun, dampak belum merata—orang tua di pedalaman masih menghadapi persoalan jarak, transportasi, dan minimnya sanitasi sekolah. Dari sisi efisiensi, tingginya biaya transportasi, proses pengadaan yang lambat, serta keterbatasan dana menyebabkan beberapa program tidak berjalan optimal. Guru menyampaikan bahwa kewajiban administrasi dan pelaporan SPM masih berat tanpa dukungan TIK yang memadai. Efisiensi juga dipengaruhi ketidaksesuaian kebijakan nasional dengan kondisi geografis 3T.

Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan administratif terhadap SPM meningkat, ditandai dengan pelaporan reguler dan penyusunan data SPM oleh dinas dan sekolah. Namun kepatuhan substantif (mutu layanan harian) masih bergantung pada ketersediaan guru, sanitasi layak, dan sarpras pendukung. Sejumlah indikator tidak tercapai bukan semata akibat kinerja kabupaten, tetapi karena dukungan pusat dan provinsi yang belum optimal dalam formasi guru, pembiayaan sarpras, dan pendampingan teknis.

Tingkat Produktivitas

Produktivitas layanan menunjukkan tren peningkatan melalui pelatihan guru, pemetaan kebutuhan berbasis data, dan perbaikan beberapa sarpras. Meski demikian, produktivitas sekolah di pedalaman terganggu oleh kekurangan guru, jarak tempuh panjang, dan biaya logistik tinggi. Kebijakan pusat seperti formasi PPPK, BOS, dan DAK yang tidak proporsional terhadap kondisi geografis turut menurunkan efisiensi program di wilayah 3T.

Umpan Balik dan Evaluasi

Mekanisme feedback internal sudah berjalan melalui laporan sekolah, supervisi pengawas, dan evaluasi bersama Bappelitbangda. Namun partisipasi masyarakat masih terbatas dan forum konsultasi publik belum berjalan optimal. Selain itu, sinkronisasi evaluasi antara kabupaten–provinsi–pusat masih lemah, sehingga rekomendasi kebijakan dari pusat sering tidak sesuai konteks lokal Teluk Bintuni.

Keterkaitan dengan Teori Akuntabilitas

Penerapan SPM mencerminkan akuntabilitas kinerja dan proses melalui standar yang jelas dan pelaporan berkala. Namun dalam perspektif akuntabilitas multilevel, pencapaian indikator SPM tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kebijakan pusat dan provinsi. Keterbatasan dukungan fiskal, regulasi seragam yang tidak sesuai kondisi 3T, serta minimnya pendampingan teknis menunjukkan bahwa akuntabilitas implementasi SPM merupakan tanggung jawab bersama lintas level pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara, observasi, dan telaah dokumen terkait implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPM merupakan proses yang sedang berjalan dan menunjukkan komitmen kelembagaan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Siklus implementasi telah dilaksanakan secara berurutan—mulai dari sosialisasi, pengumpulan data, analisis kesenjangan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi—serta terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran dinas. Kendati demikian, tingkat kepatuhan terhadap indikator SPM masih bervariasi antarsatuan pendidikan dan wilayah, terutama dipengaruhi oleh tantangan geografis–demografis, keterbatasan anggaran daerah, serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (khususnya distribusi dan kompetensi guru) di wilayah terpencil. Efektivitas SPM tampak pada perbaikan bertahap (misalnya peningkatan kualifikasi guru, sebagian sarana-prasarana, dan akses), tetapi pemerataan hasil belum tercapai sepenuhnya; sementara itu efisiensi masih tertekan oleh biaya logistik yang tinggi dan proses pengadaan yang memakan waktu. Mekanisme umpan balik dan evaluasi berjalan melalui jalur internal dinas dan pelaporan ke pemerintah daerah, namun partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik perlu diperkuat agar responsivitas dan akuntabilitas publik meningkat. Inisiatif prioritas daerah—seperti program “Menyala Internetku” dalam bingkai “Smart Village” yang mendorong pemanfaatan konektivitas internet (termasuk pemasangan perangkat koneksi satelit di $\pm 35\%$ satuan pendidikan PAUD–SD–SMP dan kesetaraan di wilayah terpencil)—memberi peluang percepatan pembaruan data (mis. Dapodik), komunikasi jarak jauh, serta monitoring kinerja guru dan sekolah. Secara keseluruhan, dinas menunjukkan itikad baik dan upaya berkelanjutan menjadikan SPM sebagai kerangka kerja peningkatan layanan; namun pencapaian target secara optimal tetap memerlukan

strategi adaptif dan komprehensif untuk mengatasi karakteristik kewilayahan dan keterbatasan sumber daya yang spesifik di Teluk Bintuni.

Untuk mempercepat pemenuhan SPM secara merata, dinas disarankan menguatkan perencanaan strategis yang adaptif dan berbasis data riil di tingkat satuan pendidikan (memprioritaskan indikator paling mendesak per wilayah), menerapkan strategi diferensiasi sesuai karakter geografis (pesisir, pedalaman/pegunungan) beserta rencana kontingensi, serta mengoptimalkan anggaran melalui alokasi berbasis kesenjangan, efisiensi pengadaan (misalnya *framework agreement* dan *bundling* kebutuhan standar), dan perluasan kemitraan (swasta/CSR, NGO, program pusat–provinsi). Di sisi SDM, pemetaan kebutuhan guru yang granular perlu diikuti kebijakan insentif–retensi untuk wilayah terpencil (tunjangan khusus, hunian, jalur karier) dan pelatihan berkelanjutan (pembelajaran inovatif, TIK, manajemen sekolah) bagi guru dan aparatur pelaksana SPM. Pada infrastruktur, lakukan inventarisasi menyeluruh, tetapkan prioritas pembangunan/perbaikan berdasar dampak terhadap indikator SPM, serta kembangkan solusi akses inovatif (sekolah filial, transportasi siswa, pembelajaran jarak jauh berbasis konektivitas). Partisipasi publik dan transparansi perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi rutin dengan masyarakat/komite sekolah, sosialisasi SPM yang mudah dipahami, serta publikasi terbuka data, rencana, dan realisasi anggaran–program. Terakhir, sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif harus diperkuat dengan indikator kinerja lokal yang terukur, peningkatan kualitas data (akurat, valid, *up to date*), evaluasi yang menilai bukan hanya output tetapi juga dampak, dan pemanfaatan hasil monev sebagai umpan balik berkelanjutan untuk perbaikan perencanaan dan implementasi—termasuk pemanfaatan perluasan konektivitas internet sebagai enabler pelaporan waktu nyata dan pengawasan kinerja di wilayah sulit akses.

REFERENSI

- Ali, M. (2012). *Pendidikan dan Pembangunan di Wilayah 3T: Tantangan dan Solusi Pemerataan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alam, R. (2023). Analisis Pelaksanaan SPM di Sektor Transportasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing performance: International comparisons*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203935958>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Fadlika, N. (2024). Pengaruh Sumber Daya dan Komitmen Manajemen terhadap Keberhasilan Implementasi SPM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 12(1), 22–35.

- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2021). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Hadi, R., & Sunarto, D. (2024). Analisis Pembiayaan dan Efisiensi Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 51–66.
- Hennink, M. M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. (Lihat juga ringkasan temuan terkini tentang ukuran sampel analisis kualitatif). <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM*. <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/peraturan/PMDN59.pdf>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE. (Ringkasan teknik *trustworthiness*). <https://www.qualres.org/HomeLinc-3684.html>
- Marta, L. (2024). Evaluasi Implementasi SPM Layanan Dasar Kesehatan Bayi Baru Lahir di Indonesia Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 88–102.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE. (Pratinjau PDF). https://archive.org/download/spradleyanalisisdatakualitatifmodeletnografi/Matthew_Miles%2C_Michael_Hberman%2C_Johnny_Saldana-Qualitative_Data_Analysis_A_Methods_Sourcebook-Sage_%282014%29%5B1%5D.pdf
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Palinkas, L. A. (2024). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire research process. *Quality & Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE. (Keterangan buku & cakupan edisi ke-4). <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018>
- Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Pelaksana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Pratama, R., & Rahmawati, D. (2022). Perbandingan Capaian SPM Pendidikan antara Sekolah Negeri dan Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 10(3), 231–244.
- Risdiyanti, L. (2024a). Analisis Ketimpangan Pembiayaan Kesehatan dalam Pelaksanaan SPM Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 14(1), 64–77.
- Risdiyanti, L. (2024b). Dominasi Dana Transfer dalam Pembiayaan SPM Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Daerah*, 8(2), 120–133.

- Safaruddin, A., Riskasari, L., & Masyitah, F. (2022). *Akuntabilitas Implementasi Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 77–89.
- Sulistiyorini, D. (2024). *SPM Transportasi: Tantangan Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna Layanan. Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 15(1), 55–70.
- Susanti, R., & Wahyudi, T. (2020). *Kualitas Guru dan Tantangan Implementasi SPM di Daerah Tertinggal. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 99–113.
- Wahyuni, S. (2022). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Sektor Kesehatan: Studi Efektivitas Pelayanan Publik. Jurnal Manajemen Publik dan Pelayanan Sosial*, 7(3), 145–158.
- Wijayanti, R., & Kurniawan, A. (2021). *Pengaruh Implementasi SPM terhadap Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Dasar. Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(1), 33–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.